



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD SUBIJAKTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 188627

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.196.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.000 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, Rp. 435.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI , Rp. 331.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 424.600.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, TOYOTA DIESEL Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 363.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.999.600.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.999.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.